

LAPORAN
STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
PROVINSI BANTEN
TAHUN 2006



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PENGANTAR

Laporan Tahunan Keadaan Lingkungan/*Annual State of the Environment Report* (ASER) Provinsi Banten Tahun 2006 disusun sesuai dengan Dokumen Perjanjian Pinjaman antara Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia. PPSU-WJEMP/Bapedal Provinsi Banten bertanggung jawab mempersiapkan ASER-WJEMP sebagai bagian dari kewajiban WJEMP.

Bapedal Provinsi Banten telah menyusun Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Tahun 2006. Laporan ini memberikan gambaran mengenai lingkungan di daerah dan mengkaji kemungkinan kebijaksanaan dan pengembangan program untuk mengurangi masalah-masalah lingkungan hidup.

Informasi yang disajikan di dalam SLHD diperlukan untuk digunakan sebagai informasi dasar ASER-WJEMP yang memberikan gambaran dan mengevaluasi dampak dari program WJEMP di Provinsi Banten dan juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan merupakan bagian dalam meningkatkan kesadaran kepada masyarakat, digunakan di sekolah-sekolah dan dapat didownload dalam Homepage Bapedal Provinsi dengan alamat <http://www.bapedalbanten.go.id>.

ASER Provinsi Banten disusun dengan sistematika :

Bagian I Identifikasi Masalah Utama Lingkungan Hidup
Identifikasi Masalah Lingkungan Hidup di Provinsi Banten

Bagian II Upaya dan Proyek Penanganan Pemprov

Upaya Pemprov saat ini terkait dengan WJEMP atau proyek yang relevan; Tindakan/langkah yang telah dilaksanakan Pemprov; dan Penanggulangan Pemprov ke depan.

Bagian III Proyek WJEMP

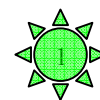
Proyek WJEMP di Provinsi Banten

Bagian IV Sektor Kunci Monitoring WJEMP

Strategi Lingkungan Hidup Provinsi Banten; Kesadaran dan Peran Serta Masyarakat Terhadap Lingkungan Hidup; dan Limbah Padat

Bagian V Kondisi Umum Lingkungan Hidup Provinsi Banten Tahun 2006

Kondisi Udara; Sumber Daya Air dan Sumber Daya Lahan



BAGIAN I

IDENTIFIKASI MASALAH UTAMA LINGKUNGAN HIDUP

Kegiatan pembangunan dan pesatnya kemajuan teknologi diberbagai bidang akan menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif, yaitu berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang pada akhirnya akan berakibat penurunan kualitas atau degradasi lingkungan. Sebagai provinsi baru, Banten saat ini sedang giat meningkatkan pembangunan pada berbagai sektor seperti industri, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, kesehatan, pertambangan, perumahan, perdagangan dan transportasi. Kegiatan-kegiatan tersebut diperkirakan akan dan telah mempengaruhi kelestarian lingkungan hidup.

Kegiatan pembangunan apabila tidak memperhatikan masalah lingkungan tentunya akan mengakibatkan terganggunya keseimbangan ekosistem dan terjadinya degradasi lingkungan seperti tanah longsor, erosi, sedimentasi, penggundulan hutan, peningkatan lahan kritis, pencemaran tanah, air dan udara, abrasi pantai, instrusi air asin, serta penurunan debit air permukaan dan air tanah.



Terjadinya kerusakan, pencemaran dan degradasi lingkungan di atas hampir ditemui disetiap Kab/Kota di wilayah Provinsi Banten. Permasalahan lingkungan di Provinsi Banten dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Pencemaran Lingkungan :
 - a. Penurunan kualitas air permukaan (pencemaran air permukaan);
 - b. Gangguan kehidupan biota air sebagai dampak turunan dari pencemaran air permukaan ;

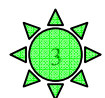
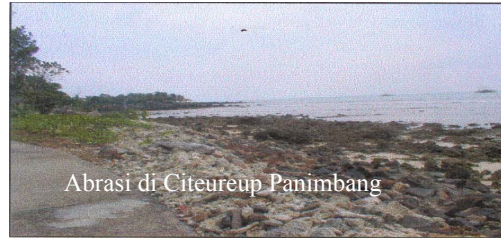


- c. Penurunan kualitas udara (pencemaran udara) dan peningkatan kebisingan;
 - d. Penurunan estetika lingkungan dan bau sampah;



2. Kerusakan Lingkungan :

- a. Intrusi air asin ke wilayah daratan (peningkatan salinitas air tanah);
- b. Penurunan kuantitas air di badan penerima dan air tanah;
- c. Erosi;
- d. Kerusakan atau punahnya hutan bakau;
- e. Kerusakan terumbu karang;
- f. Rusaknya ekosistem pantai akibat abrasi;
- g. Kerusakan ekosistem sungai karena pendangkalan dan banjir;
- h. Kerusakan lahan dan penggundulan hutan.



Bagian II

UPAYA DAN PROYEK PENANGANAN PEMPROV

2.1 Upaya Pemprov saat ini terkait dengan WJEMP atau proyek yang relevan

Pembangunan di Provinsi Banten dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan yang berkeadilan dan merata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan. Hal tersebut dimaksudkan agar dalam melaksanakan pembangunan di Provinsi Banten ini harus disesuaikan dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan, agar tetap terjaga keseimbangan lingkungan hidup. Implementasi pembangunan berkelanjutan mempunyai makna yang luas, dimana dituntut keterpaduan perencanaan program dan pelaksanaan kegiatan serta keterlibatan seluruh stakeholders termasuk masyarakat. Penyebarluasan informasi yang berkenaan dengan lingkungan hidup merupakan bentuk implementasi pembangunan berkelanjutan.

Upaya Pemerintah Provinsi Banten saat ini yang terkait dengan pengelolaan lingkungan akan ditempuh melalui perwujudan Misi Bapedal 2005-2010 yang meliputi 4 (empat) hal yaitu :

- 1) Meningkatkan pentaatan terhadap hukum dan peraturan bidang lingkungan.
- 2) Meningkatkan kapasitas lembaga, SDM, dan instrumen pendukung pengendalian lingkungan.
- 3) Meningkatkan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- 4) Meningkatkan pelayanan informasi lingkungan hidup bagi kepentingan masyarakat, aparatur, dan dunia usaha.

2.2 Tindakan/langkah yang telah dilaksanakan Pemprov

Tindakan/langkah yang telah dilaksanakan Pemerintah Provinsi Banten pada tahun 2006 berkaitan dengan Misi Bapedal tersebut di atas adalah :

- a. Program Adiwiyata**
Program ini bertujuan menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah untuk menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah (guru, murid dan pekerja lainnya), sehingga dikemudian hari warga sekolah tersebut dapat turut bertanggungjawab dalam upaya penyelamatan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan
2315/ Dep VI/LH/ 04/ 06 tanggal 21 April 2006 Perihal Pemberitahuan Nominator Sekolah Model Adiwiyata
Dan pada tahap selanjutnya, tahap penilaian proposal, SMAN 4 Pandeglang masuk kedalam 10 nominator sekolah model Adiwiyata dari tingkat SD , SMP dan SLTA se-Pulau Jawa berdasarkan Surat Sekretaris Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor ; Kep.22/ SES/LH/ 6/ 2006 tentang Model Sekolah Adiwiyata 2006;
- b. Penyuluhan Lingkungan Hidup Melalui Media Radio**
Program ini bertujuan menyebarluaskan informasi lingkungan hidup kepada masyarakat dalam bentuk *Talk Show* dan iklan layanan masyarakat. Dengan penyuluhan ini



diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan.

Dari segi respon pendengar dalam bentuk pertanyaan baik melalui SMS maupun jalur telpon *on air*, mengindikasikan adanya peningkatan pengetahuan masyarakat, hal ini terlihat kalau tahun-tahun sebelumnya pengetahuan lingkungan hidup menurut para penanya meliputi sampah dan banjir, tapi pada tahun 2006 pertanyaan dari para pendengar sudah sesuai dengan tema tiap *talk show*.

Selain peningkatan pengetahuan masyarakat, terjadi peningkatan perhatian masyarakat, hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah pertanyaan dan jumlah penanya. Kalau pada tahun 2005 rata-rata 7 pertanyaan dari 5 penanya, pada tahun 2006 rata-rata 9 pertanyaan dari 7 penanya.

- c. Terlaksananya **Inventarisasi Data Pencemaran Lingkungan Sungai**, pada Proyek Pembinaan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2002. Bermaksud untuk mengetahui tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan Sungai Ciujung di Wilayah Provinsi Banten yang diakibatkan oleh aktivitas pembangunan berbagai sektor, dan bertujuan mengidentifikasi tingkat pencemaran kualitas air sungai Ciujung. Hasil kegiatan ini adalah terlaksananya pemantauan kualitas air sepanjang Sungai Ciujung, dan

rekomendasi upaya pengelolaan, pencegahan dan pencemaran lingkungan sungai.

- d. Terlaksananya **Inventarisasi Data Pencemaran Lingkungan Pesisir Dan Laut**, pada Proyek Pembinaan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2002. Bermaksud untuk mengetahui tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan pesisir dan laut di Wilayah Pantai Teluk Banten dan Pantai Kota Cilegon akibat aktivitas pembangunan berbagai sektor, dan bertujuan mengidentifikasi tingkat pencemaran kualitas air pesisir dan laut di Wilayah Pantai Teluk Banten dan Pantai Kota Cilegon. Hasil kegiatan ini adalah terlaksananya pemantauan kualitas air sepanjang Pesisir dan Laut di Wilayah Pantai Teluk Banten dan Pantai Kota Cilegon dan rekomendasi upaya pengelolaan, pencegahan dan pencemaran lingkungan pesisir dan laut.

- e. Terlaksananya kajian **Analisis Pola Penyebaran Polusi Udara di Provinsi Banten**, pada Proyek Pembinaan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2002. Bermaksud untuk memperoleh gambaran informasi awal mengenai karakteristik udara lokal di Wilayah Banten, yaitu informasi mengenai tentang ciri-ciri cuaca dan iklim, yang meliputi pola pergerakan angin dominan, stabilitas atmosfer dan ketinggian lapisan pencampuran polutan, serta pola sebaran polutan di atmosfer untuk wilayah Provinsi Banten. Hasilnya kegiatan ini adalah diketahuinya karakteristik udara lokal wilayah Banten, yaitu analisis cuaca dan iklim lokal yang dapat memberikan informasi mengenai pola pergerakan angin dominan, diketahuinya tingkat stabilitas atmosfer, diketahuinya tinggi lapisan pencampuran polutan di atmosfer, jumlah curah hujan, yang semuanya

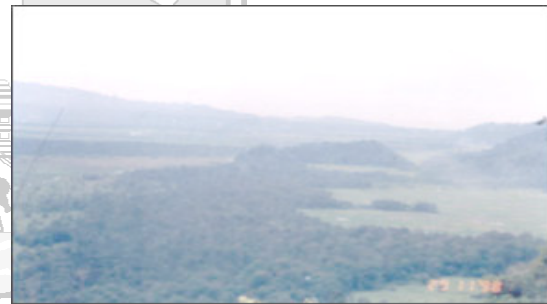
berguna untuk menentukan pola sebaran polutan di udara.

f. Terlaksananya **Kajian Kerusakan Hutan di Gunung Karang Provinsi Banten**, pada kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup Tahun 2004. Bermaksud untuk mengetahui kondisi eksisting kerusakan hutan di Gunung Karang, dan bertujuan menjaga dan melestarikan hutan di Gunung Karang agar berfungsi secara optimal sebagai kawasan lindung. Hasil kegiatan ini adalah tersusunnya database kerusakan fisik lahan/kekritisian lahan di kawasan hutan Gunung Karang, tersusunnya database keanekaragaman hayati di kawasan Gunung Karang, tersusunnya data hidrologi/tata air di kawasan hutan Gunung Karang, dan tersusunnya rencana penanganan kawasan hutan gunung karang.

g. **Pengelolaan Kawasan Akarsari**
Dengan telah ditandatanganinya Naskah Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Pemkot Cilegon tentang Kerjasama Pengelolaan Pegunungan Akarsari (Aseupan, Karang, dan Pulosari) sebagai Menara Air Nomor 660/341/Umum, Nomor 661/618/Umum dan PKL dan Nomor 660/530/Umum tanggal 11 Desember 2004 yang ditandatangani oleh 3 Kepala daerah dan diketahui oleh Gubernur Banten dan Menteri Negara Lingkungan Hidup. Tujuan kesepakatan ini adalah : (1) meningkatkan fungsi kawasan pegunungan Akarsari sebagai menara air, melalui rencana aksi sesuai dengan kewenangan, kemampuan dan kepentingan para pihak; (2) mendorong pemanfaatan jasa Kawasan Pegunungan Akarsari, untuk melakukan pembayaran jasa lingkungan yang akan dipergunakan untuk pembiayaan pengelolaan

Kawasan Pegunungan Akarsari; (3) menyusun rencana kegiatan tahunan, sebagai penjabaran dari rencana aksi bersama tersebut untuk masing-masing daerah dan instituis terkait; (4) melakukan koordinasi dalam memecahkan persoalan yang berkaitan dengan percepatan realisasi aksi bersama tersebut, yang difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Banten. Kerjasama tersebut sudah ditindak lanjuti dengan kegiatan antara lain :

- Lokakarya Pembentukan forum Akarsari
- Pembentukan Kelompok Masyarakat Pelestarian Lingkungan Akarsari
- Kemah Lingkungan Bersama Pramuka se-Provinsi Banten dengan Mengadakan Gerakan Penanaman seluas 10 Hektar dengan jumlah 4000 batang tanaman



Rawa Danau

h. **Penerapan Jasa Lingkungan**

Terealisasinya Pembentukan Forum Komunikasi DAS Cidanau (FKDC) 2002, dengan tugas pokok : (1) menampung kepentingan *stakeholders* yang meliputi Pemerintah, Lembaga Ilmu pengetahuan dan teknologi, Institusi Akademik, Industri, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan masyarakat umum tentang DAS Cidanau; (2) merumuskan berbagai aspek kebijakan yang perlu dikembangkan untuk pengelolaan DAS Cidanau; (3) Menyusun Master Plan untuk

pengelolaan DAS Cidanau; (4) menentukan arah, strategi dan prioritas dalam hal pengelolaan DAS Cidanau; dan (5) melaksanakan pemantauan dan mengevaluasi efektivitas pengelolaan DAS Cidanau. Salah satu keberhasilan penting forum ini adalah membangun hubungan hulu hilir dengan mekanisme jasa lingkungan, dan PT. Krakatau Tirta Industri merupakan *pioneer buyer* jasa lingkungan DAS Cidanau, yang dengan sukarela membayar Rp. 175.000.000,- per tahun, dengan masa perjanjian pembayaran jasa lingkungan selama 5 (lima) tahun. Hal ini dituangkan dalam Nota Kesepahaman antara Gubernur Banten dengan Direktur Utama PT. Krakatau Tirta Industri (KTI) Nomor 001/ FKDC/ KP – PJJ/ XI/ 2004 dengan Nomor 204 A/ MoU/ DU – KTI/ IV/ 2004 tanggal 01 Nopember 2004 tentang Pelestarian DAS Cidanau.

i. Terlaksananya **Gerakan Penghijauan Tahun 2005**, sesuai dengan Program Menuju Indonesia Hijau yang diinisiasi oleh KNLH RI pada tahun 2005. Kegiatan ini diimplementasikan oleh Provinsi Banten melalui Bapedal pada kegiatan pengendalian kerusakan lingkungan hidup Tahun 2005, berupa penanaman pohon sebanyak 1000 batang di Bumi Perkemahan Pramuka Juhut Kabupaten Pandeglang, dan Gerakan Penanaman Bambu Apus sebanyak 1000 Batang di Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak, serta Gerakan Penanaman Mangrove sebanyak 1000 batang di Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang melalui kegiatan Mobilisasi dan Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Pelestarian Dan Rehabilitasi Tata Air.

j. Terealisasinya **Pembangunan Kebun Provinsi** di Puspitek Serpong - Tangerang seluas 0,5 Hektar, berikut koleksi tanaman khas Provinsi Banten. Dengan maksud sebagai sarana

penyebarluasan informasi mengenai tanaman Khas Provinsi Banten.

k. Terlaksananya pengajuan flora **Vatica Bantemensis** (kokoleceran)



Vatica Bantemensis (kokoleceran)

dan fauna **Vatica Rhinoceros Sondaicus** (Badak bercula satu),



Vatica Rhinoceros Sondaicus (Badak bercula satu)

dengan maksud sebagai flora fauna identitas Provinsi Banten pada tahun 2004, hingga tahun 2006 belum disahkan.

1. Pada tahun 2003 Bapedal Provinsi Banten telah melakukan kajian tentang **Baku Mutu Air Limbah Industri Kimia** yang hasilnya diharapkan dapat dijadikan baku mutu air limbah yang spesifik untuk industri kimia yang ada di Provinsi Banten yang selama ini masih menggunakan Kepmen No.51/Menlh/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Industri. Hasil kajian tersebut selanjutnya diajukan ke KNLH RI untuk mendapat persetujuan. Namun dalam perkembangannya hasil kajian tersebut dijadikan acuan untuk menyusun BMAL Petrokimia Nasional, dan pada tahun 2006 telah diterbitkan SK Menlh No. 10 tahun 2006 tentang Baku Mutu Air Limbah atas kegiatan *Vinyl Chlorida Monomer*

(VCM) dan *Poly Vinyl Chlorid* (PVC) sebagai tindak lanjut dari hasil kegiatan tersebut, sedangkan BMAL jenis industri petrokimia lainnya masih dalam proses penyusunan draf SK Menlh.

m. PROPER

Pelaksanaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan di Provinsi Banten telah dilaksanakan sejak tahun 2003. Dengan dilaksanakannya program Proper di Provinsi Banten telah dapat meningkatkan kinerja perusahaan dalam hal pengelolaan lingkungan. Adapun keberhasilan Proper di Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Peringkat	2003	2004
Emas	Tidak ada	Tidak ada
Hijau	1	4
Biru	4	20
Merah	4	13
Hitam	1	1
Jumlah	10	38

Dari 10 (sepuluh) peserta Proper tahun 2003, 60% diantaranya mengalami peningkatan peringkat pada tahun 2004, sisanya pada peringkat yang tetap. Dan dari 10 (sepuluh) peserta Proper tahun 2003 yang meningkat menjadi 38 (tiga puluh delapan) pada tahun 2004 tersebut, banyak diantaranya yang telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit jumlahnya untuk menindaklanjuti hasil temuan tim proper.

Pada tahun 2005 telah dilaksanakan penilaian Proper pada 48 (empat puluh delapan) perusahaan namun belum diumumkan hasilnya. Rencananya hasil penilaian proper tahun 2005 baru akan diumumkan pada akhir tahun 2006 ini.

n. SUPER KASIH

Pelaksanaan program Superkasih (Surat Pernyataan Kali Bersih) di Provinsi Banten, dilakukan oleh Bapedal Provinsi Banten bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten dan Kota Tangerang, karena yang menjadi target untuk Program Superkasih tahun 2005/2006 ini adalah **Sungai Cisadane**. Calon peserta Program Superkasih merupakan usulan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten dan Kota Tangerang berjumlah 25 industri yang terletak disepanjang dan atau membuang limbahnya ke Sungai Cisadane.

Hasil pelaksanaan kegiatan Program Superkasih, dari 25 industri yang diusulkan hanya 21 industri yang mengikuti Program Superkasih karena 2 industri ternyata tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah, 1 industri sudah tidak beroperasi lagi, serta 1 industri yang menolak untuk mengikuti Program Superkasih.

Dari 21 industri peserta program Superkasih tersebut akhirnya hanya 17 industri yang menandatangani Superkasih karena 4 (empat) diantaranya diusulkan untuk mengikuti Proper yaitu :

1. PT. Surya Toto Indonesia, Kabupaten Tangerang
2. PT. ACTEM / ISTEM, Kota Tangerang
3. PT. Tifico, Kota Tangerang
4. PT. Indonesia Toray Synthetics, Kota Tangerang

Ke17 industri tersebut menandatangani surat pernyataan yang isinya bahwa pihak industri sanggup, untuk jangka waktu tertentu yang sudah ditetapkan, diantaranya untuk lebih mengoptimalkan kinerja Instalasi Pengolahan Air Limbahnya (IPAL),

melakukan perbaikan-perbaikan dan pemasangan / pembuatan alat / unit yang diperlukan untuk lebih mengoptimalkan kinerja IPAL, sehingga air limbah yang dibuang ke lingkungan dapat memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan.

- o. Pada tahun 2006 Bapedal Provinsi Banten telah mengadakan **pengelolaan**

limbah B3 terhadap 80 industri dan kegiatan usaha lainnya, dari hasil pengawasan tersebut, pihak yang diawasi telah menindaklanjuti hasil pengawasan diantaranya berupa pembuatan TPS untuk B3 dan limbah B3, pengurusan ijin pengelolaan, perbaikan sistem pengelolaan dan lain sebagainya.

2.3 Penanggulangan Pemprov kedepan

Program-program atau kegiatan ke depan diarahkan kepada :

- a. Program Pengembangan Kinerja Persampahan
Kegiatan :
 - 1) Peningkatan Peran Serta masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan (Pembuatan Kompos)
 - 2) Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan
 - 3) Kerja sama Pengelolaan Sampah antar Daerah
- b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Kegiatan :
 - 1) Pengelolaan B3 dan Limbah B3
 - 2) Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)
 - 3) Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih
 - 4) Pemantauan Kualitas Lingkungan
 - 5) Koordinasi Penyusunan Amdal
 - 6) Pengkajian Dampak Lingkungan
 - 7) Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup
 - 8) Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
- c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam
Kegiatan :
 - 1) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam
 - 2) Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan
 - 3) Koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA
 - 4) Pengelolaan Keanekaragamanhayati dan ekosistem
 - 5) Pantai Dan Laut Lestari
 - 6) Pengembangan Kelembagaan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan
- d. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya alam
Kegiatan :
 - 1) Rehabilitasi Hutan dan Lahan
 - 2) Peningkatan Peran Serta masyarakat dalam rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam

- e. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
Kegiatan :
 - 1) Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan
 - 2) Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan

- f. Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan-kawasan Konservasi Laut dan Hutan
Kegiatan :
 - 1) Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan-kawasan Konservasi

- g. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Kegiatan :
 - 1) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
 - 2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan



Bagian III

PROYEK WJEMP

1.1 Proyek WJEMP Provinsi Banten

Kegiatan WJEMP di Provinsi Banten telah diselenggarakan dari tahun 2002 hingga 2005, dalam kegiatan ini akan dicapai beberapa tujuan penting yang meliputi:

- (1) Meningkatnya kemampuan pemerintah Provinsi maupun kabupaten / kota dalam mengurangi dan mengendalikan tingkat pencemaran;
- (2) Meningkatnya iklim kompetisi dalam pengelolaan lingkungan perkotaan;
- (3) Meningkatnya kinerja manajemen persampahan;
- (4) Meningkatnya peluang kerja dan kesempatan berusaha kepada masyarakat terutama kelompok miskin dalam bidang lingkungan;
- (5) Meningkatnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan lingkungan;
- (6) Memberikan kontribusi dalam pengendalian pencemaran udara dan penurunan emisi 'gas efek rumah kaca', meningkatkan kapasitas sistem pengomposan serta upaya-upaya penghijauan.

Secara spesifik, pelaksanaan WJEMP di Provinsi Banten bertujuan untuk menyusun Strategi Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang terdiri dari:

- (1) Strategi Pengelolaan Lingkungan alami, buatan, dan lingkungan sosial;
- (2) Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi;
- (3) Strategi pengendalian pencemaran, kerusakan, dan penanggulangan bencana lingkungan;
- (4) Strategi penegakan hukum pengelolaan lingkungan;

Pada WJEMP APL I Tahun 2002 – 2005, terdapat beberapa paket *sub-project* kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah pada tingkat Provinsi dan kabupaten/kota peserta program WJEMP. Kegiatan tersebut meliputi antara lain:

- (1) Provinsi Banten
 - TA Banten 3 – 1 : Penyusunan Strategi Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Banten
- (2) Kabupaten Serang
 - a. TA Kab. Serang 3 – 1 : *Improved Solid Waste Management and FS, AMDAL and DED for New TPA in East Serang*
 - b. TA Kab. Serang 3 – 2 : *Kabupaten Serang's Local Environmental Strategy*
 - c. TA Kab. Serang 3 – 3 : *FS for Centralized Waste Water Treatment Plant for Industry*
 - d. CW Kab Serang 2 – 1 : *Pembangunan Unit Produksi Kompos*
 - e. EM Kab. Serang 1 – 1 : *Pengadaan Wheel Loader*
- (3) Kota Tangerang
 - a. TA Tangerang 3 – 1 : *Study FS, AMDAL and DED for IPLT*
 - b. TA Tangerang 3 – 2 : *Kota Tangerang Local Environmental Strategy*
 - c. TA Tangerang 3 – 4 : *FS for Centralized Waste Water Treatment Plant for Industry*

Disamping itu, kegiatan WJEMP lain yang dilaksanakan di pusat akan tetapi secara lokasional dilaksanakan di wilayah Provinsi Banten, yaitu:

- (1) Jabodetabek *Waste Management Corporation* (JWMC) yang dilaksanakan oleh Departemen PU dalam rangka pengembangan institusi penanganan persampahan di wilayah Jabodetabek. Dalam kegiatan ini pemda yang berpartisipasi adalah Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang.

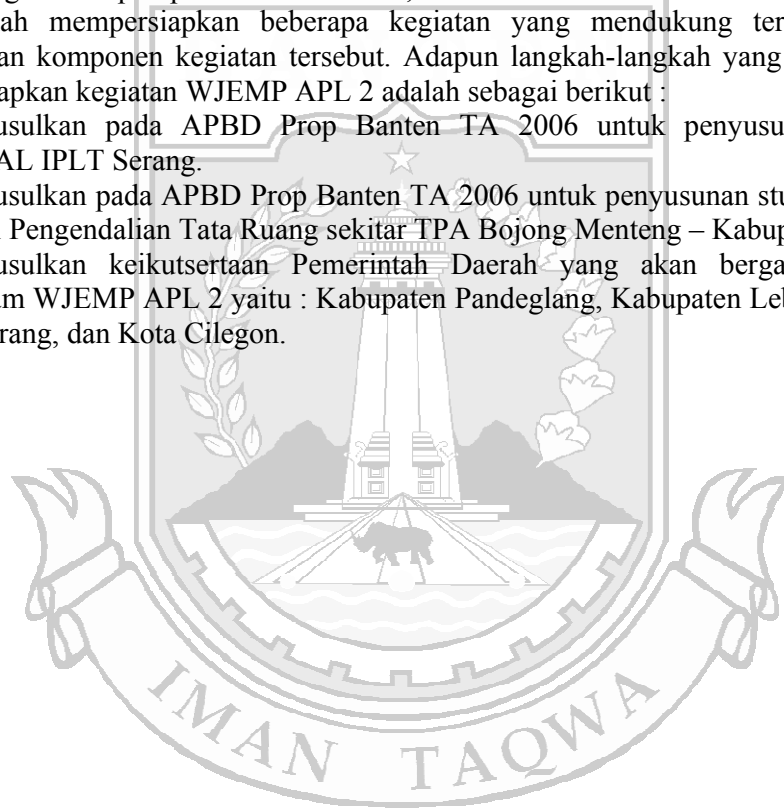
- (2) Cilegon – Serang *Emergency Preparedness* yang lokasinya di Cilegon. Dalam kegiatan ini dirumuskan model sistem antisipasi penanggulangan bencana industri yang mungkin terjadi di kawasan industri, yang berpotensi berdampak luas baik terhadap kerusakan lingkungan maupun mengancam keselamatan penduduk sekitar.

Dan pada tahap selanjutnya, program WJEMP akan memasuki tahapan APL 2 yang dicanangkan mulai tahun 2007. Pada WJEMP tahap APL 2 ini yang telah menyatakan akan melanjutkan keikutsertaannya adalah Kabupaten Serang, sedangkan Kota Tangerang memutuskan untuk mengundurkan diri. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan pada APL 2 di Kabupaten Serang meliputi 3 (tiga) komponen yaitu :

- (1) *Construction of TPSA Bojong Menteng*
- (2) *Improvement of Solid Waste Management*
- (3) *Construction of IPLT Serang*

Dalam rangka kesiapan pelaksanaan APL 2, Pemerintah Provinsi Banten melalui peranan PPSU telah mempersiapkan beberapa kegiatan yang mendukung terhadap rencana pelaksanaan komponen kegiatan tersebut. Adapun langkah-langkah yang diambil dalam mempersiapkan kegiatan WJEMP APL 2 adalah sebagai berikut :

- (1) Mengusulkan pada APBD Prop Banten TA 2006 untuk penyusunan DED dan AMDAL IPLT Serang.
- (2) Mengusulkan pada APBD Prop Banten TA 2006 untuk penyusunan studi Penyusunan Model Pengendalian Tata Ruang sekitar TPA Bojong Menteng – Kabupaten Serang.
- (3) Mengusulkan keikutsertaan Pemerintah Daerah yang akan bergabung kedalam program WJEMP APL 2 yaitu : Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, dan Kota Cilegon.



Bagian IV

SEKTOR KUNCI MONITORING WJEMP

4.1 Strategi Lingkungan Hidup Provinsi Banten

Strategi Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Banten yang akan dilaksanakan, pada umumnya akan menangani isu-isu lingkungan dan membuat prioritas kebijaksanaan yang meliputi antara lain :

- a. Pencemaran Polusi Udara dan Air dari berbagai sumber
- b. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang penyakit yang diakibatkan oleh polusi perkotaan dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang cara-cara untuk menanggulangi dampak tersebut.
- c. Tidak lengkap atau tidak tersedianya acuan kerja yang menyangkut; (i) peraturan, (ii) pemberdayaan lingkungan, (iii) biaya pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan, dan (iv) peraturan-peraturan yang mengatur atas adanya pelanggaran-pelanggaran, sehingga perlu upaya, mengurangi biaya pembuangan limbah padat, dan meningkatkan pendapatan atas pengelolaan pembuangan limbah padat.
- d. Lemahnya manajemen pada semua tingkat serta tidak jelasnya peraturan pada setiap tingkat, mengakibatkan rendahnya koordinasi antar bagian secara horizontal maupun vertikal sehingga mengakibatkan rendahnya tingkat pelayanan.
- e. Keterbatasan sumber daya modal, khususnya yang bersumber dari pemerintah untuk menyediakan sarana maupun prasarana dalam mengatasi permasalahan lingkungan, maka perlu menciptakan iklim usaha yang dapat mendorong keterlibatan investasi pihak swasta asing maupun swasta nasional, mendorong kegiatan yang bertujuan mengurangi limbah, dan menerapkan prinsip pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Salah satu pertimbangan utama didalam penyusunan Rencana Strategis Lingkungan Provinsi Banten adalah menggunakan dan atau mengadopsi strategi nasional, digabungkan dengan kebutuhan/kepentingan regional (pada tingkat provinsi), serta mendukung persiapan penyusunan strategis lingkungan kabupaten/kota. Strategi dasar ditujukan untuk pengelolaan lingkungan di era otonomi khususnya mengenai pembuangan dan perlakuan limbah cair, pengelolaan kualitas air, pengelolaan persampahan/limbah padat (termasuk limbah berbahaya), permukiman penduduk, dan penghijauan di kawasan perkotaan. Strategi ini akan menyediakan alat dan pedoman pokok untuk pengelolaan lingkungan di wilayah kabupaten/kota. Untuk melaksanakan kebijakan dibutuhkan penguatan kapasitas pada tingkat pemerintah kabupaten dan kota, yang meliputi tidak hanya syarat pengetahuan dan keterampilan, akan tetapi juga penyesuaian akan sikap dan tingkah laku dari pegawai pemerintah/aparatur yang sesuai dengan paradigma baru pembangunan.

4.2 Kesadaran dan Peran Serta Masyarakat Terhadap Lingkungan Hidup di Provinsi Banten

Walaupun tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya memelihara lingkungan (pelestarian lingkungan) makin meningkat, namun kesadaran untuk berbuat sesuatu untuk mencegah pencemaran dan perusakan lingkungan masih merupakan kelemahan utama. Pemahaman masyarakat mengenai keterkaitan antara kependudukan dan lingkungan hidup belum memadai, sementara berbagai kearifan tradisional yang berorientasi menjaga keseimbangan interaksi ekosistem sudah semakin ditinggalkan karena faktor ekonomi, teknologi dan lain-lain. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan Sumberdaya Alam yang memperhatikan Penataan Ruang, dan kaidah pemanfaatan yang berkelanjutan dalam proses pembangunan masih lemah, sehingga keterlibatannya dalam menjamin kesinambungan produktivitas sumberdaya alam dan menjaga kualitas ruang serta lingkungan relatif belum optimal. Hak dan Kewajiban masyarakat serta mekanisme

peran-sertanya dalam upaya pemanfaatan dan pelestarian Sumberdaya Alam serta Penataan Ruangnya belum diindahkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang ada, hal ini antara lain tercermin dari banyaknya kasus pelecehan hak-hak masyarakat dalam pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Penataan Ruang.

Adapun tingkat kesadaran masyarakat di perkotaan terhadap lingkungan sudah cukup berkembang, namun belum sampai pada tingkat partisipasi aktif (berbuat), sedangkan Lembaga Masyarakat yang tangguh untuk mengelola dan menghadapi berbagai masalah lingkungan hidup masih belum berkembang dan representatif, adapun peran-serta masyarakat kalangan Perguruan Tinggi terutama dilakukan melalui Pusat Studi (Penelitian Lingkungan) dan Kelompok Studi Mahasiswa sifat perhatiannya masih bermakna eksklusif.

4.3 Limbah Padat

Propinsi Banten dengan jumlah penduduk 9.308.944 juta jiwa, memproduksi sampah padat $\pm 19.097 \text{ m}^3$ setiap hari. Terdapat kecenderungan turunnya jumlah sampah yang diproduksi penduduk dengan semakin meningkatnya kepadatan suatu wilayah. Kabupaten dan Kota Tangerang dengan kepadatan lebih dari 2000 jiwa/km² memproduksi sampah rata-rata sekitar 1.24 lt per kapita per hari, sebaliknya kabupaten lain dengan kepadatan penduduk yang lebih jarang menghasilkan sampah rata-rata sebesar 2,06 lt per kapita per hari.



Pengelolaan sampah untuk mewujudkan kebersihan dan kesehatan lingkungan serta menjaga keindahan lingkungan baik pada lokasi sumber sampah, tempat pembuangan sementara (TPS) dan tempat pembuangan akhir (TPA) perlu dilakukan secara terpadu dan komprehensif karena tanggung jawab pengelolaan ini tidak hanya berada di pemerintah daerah (Dinas/Subdinas Kebersihan) saja, namun menjadi tanggung jawab bersama. Di daerah perkotaan sebagian

kecil sampah dikumpulkan atau didaur ulang oleh pemulung seperti: plastik, kertas, kayu, dll untuk dijual dan selanjutnya dipergunakan kembali.



Saat ini pengelolaan sampah yang dilakukan di Propinsi Banten masih tersentralisasi di pemerintah daerah dan/atau propinsi. Pemerintah daerah pada level kabupaten/kota dalam hal ini adalah dinas atau subdinas kebersihan bertugas dalam pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dan pengelolaan sampah di TPA.

Secara umum pembuangan sampah ke TPA milik kabupaten/kota di Propinsi Banten masih dengan cara ditimbun dan dibakar (*open dumping*), walaupun di beberapa kabupaten/kota sudah dirancang menggunakan teknologi *sanitary landfill* tetapi prakteknya tetap secara *open dumping*.

Pada umumnya sistem pengelolaan atau pembuangan sampah rumah tangga di wilayah perkotaan dan pedesaan berbeda, karena di pedesaan sebagian besar sampah dapat diselesaikan dalam skala komunitas dengan cara ditimbun ke dalam tanah dan dibakar, sisanya diangkut petugas, dibuang ke sungai atau selokan dan dibuang ke sembarang tempat. Sampah di perkotaan sebagian besar diangkut oleh petugas ke lokasi pembuangan sampah sementara (TPS) untuk selanjutnya dibuang ke TPA, sedangkan sampah yang dibuang ke sungai/selokan, dibakar dan dibuang secara sembarangan jumlahnya relatif kecil.

Beberapa kegiatan yang umum dilakukan oleh masyarakat di Propinsi Banten dalam mengelola sampah yang terbentuk selain mengumpulkan dan menimbun (landfill) antara lain adalah segregasi sampah skala rumah tangga dan segregasi bahan di tempat pengolahan serta pengomposan.

Sarana pengelolaan sampah yang sekarang tersedia di Propinsi Banten masih tergolong kurang dan dapat ditingkatkan lagi jumlahnya terutama untuk sarana pengangkutan agar pelayanan pengelolaan sampah dapat ditingkatkan dan lebih memadai.



Bagian V

Kondisi Umum Lingkungan Hidup Provinsi Banten Tahun 2006

5.1 Status Pencemaran dan Kualitas Udara

Pencemaran udara di Provinsi Banten terutama di daerah perkotaan dari waktu ke waktu diperkirakan akan semakin meningkat seiring dengan laju pertumbuhan pembangunan di berbagai sektor seperti sektor industri, perhubungan/transportasi dan pariwisata. Hal ini perlu mendapatkan perhatian secara serius dan perlu penanganan atau pengendalian secara baik dan komprehensif antara instansi terkait.



Pencemaran Udara Kendaraan

Sumber-sumber utama penyebab pencemaran udara yang terdapat di Provinsi Banten meliputi 4 (empat) kegiatan yaitu :

- Kegiatan transportasi
- Kegiatan industri
- Kegiatan rumah tangga atau pemukiman
- Persampahan

Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa kondisi kualitas udara di Provinsi Banten relatif masih cukup baik terutama di kawasan pedesaan. Namun diperkirakan ada beberapa parameter pencemar udara yang telah mengalami peningkatan secara signifikan dan pada beberapa lokasi telah mendekati dan bahkan diatas nilai ambang batas (NAB).

Peningkatan parameter pencemaran udara tersebut telah terjadi terutama di daerah perkotaan yang rawan kemacetan, dikawasan industri, pelabuhan, bandara, daerah wisata, dll. Jenis parameter pencemaran yang telah mengalami peningkatan tersebut antara lain adalah karbon monoksida (CO), debu dan HC sedang parameter lain seperti SO₂, NH₃ dan H₂S tidak terdeteksi.



Wasdal Pencemaran Udara

5.2 Status dan Kondisi Pencemaran Air dan Limbah Cair



Sungai Cirarab

Permasalahan pencemaran dan limbah cair yang ada pada Provinsi Banten tidak terlepas dari kondisi daya dukung lingkungan yang ada pada saat ini. Pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan semakin besarnya jumlah industri yang ada dan juga penambahan jumlah penduduk yang cukup tinggi, baik secara langsung ataupun tidak, dapat menekan kondisi lingkungan dan sumberdaya alam yang ada, terutama sekali sumberdaya air. Kondisi tertekannya sumberdaya air tidak hanya jumlahnya yang semakin berkurang, namun juga adalah kondisi pencemaran yang dirasakan semakin lama tingkatannya semakin berat, sehingga banyak sungai ataupun danau yang telah mengalami penurunan fungsi peruntukkannya.

5.2.1 Pencemaran Sungai

Pada umumnya kabupaten dan kota di Provinsi Banten dialiri oleh sungai-sungai yang besar, kecuali Kota Cilegon. Sungai-sungai tersebut banyak dimanfaatkan, terutama sekali untuk keperluan masyarakat sehari-hari, dan adanya pencemaran sungai sedikit banyak akan mempengaruhi kondisi kehidupan masyarakat. Pencemaran sungai yang ada di Provinsi Banten mempengaruhi kualitas air sungai, dan pada akhirnya daya guna dan fungsi sungai akan berubah.



Kekeruhan Sungai Cimoyan

Pencemaran yang terjadi pada sungai memberikan dampak yang cukup luas, salah satunya terhadap penurunan kualitas air laut. Laut sebagai tujuan akhir air sungai akan menjadi tempat tertampungnya senyawa-senyawa pencemar yang dibawa sungai. Kondisi muara ataupun kawasan pesisir dan laut akan mendapatkan pengaruh yang cukup signifikan sebagai akibat adanya pencemaran sungai.

5.2.2 Pencemaran Pesisir dan Laut

Pencemaran pesisir dan laut akan mempengaruhi beberapa parameter kualitas air laut, yang memberikan indikasi mengalami penurunan. Parameter kualitas air laut yang dapat tercemar adalah suhu, karena beberapa perusahaan membuang air dari stasiun pendinginan (condenser) yang dapat meningkatkan suhu perairan sekitarnya. Beberapa parameter kimia juga perlu mendapat perhatian seperti nitrit, fenol, seng dan nitrat yang diakibatkan oleh limbah domestik dan industri.

Kondisi kualitas air di Teluk Banten hasil pemantauan yang dilakukan oleh TP2LI pada tahun 2001 menunjukkan bahwa dari 9 titik pengambilan sample, konsentrasi COD dan BOD telah melampaui baku mutu, untuk parameter COD konsentrasi terbesar terjadi di lokasi pengambilan sampel 1 km Parakan Perairan Tunda yaitu sebesar 620 mg/l (BML 80 mg/l) dan parameter BOD konsentrasi terbesar terjadi di lokasi pengambilan sampel Pulo Pamojan Keci - Muara Karangantu yaitu sebesar 110 mg/l (BML 45 mg/l).



Pengambilan sampel Air Laut di Selat Sunda

Pengamatan dan analisis kualitas air perairan pantai dan laut yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang (2002), memperlihatkan adanya indikasi pencemaran logam berat kadmium (Cd) dan nikel (Ni) yang berada diatas baku mutu yang diperbolehkan bagi keperluan budidaya perikanan. Hasil pengukuran didapat kandungan logam Cd berkisar 0.011 – 0.179 mg/l, sementara baku mutu adalah ≤ 0.01 mg/l.

5.2.3 Limbah Cair

Potensi pencemaran limbah cair domestik terhadap lingkungan, terutama sekali dikarenakan oleh adanya kandungan bahan organik dan juga mikroorganisme koliform. Pada kajian penelitian di salah satu kabupaten di Provinsi Banten tahun 1999 (NKLD Kabupaten Tangerang tahun 1999) menunjukkan beban pencemaran limbah domestik

dengan volume limbah 129180000 m³/tahun adalah BOD (40313 ton/tahun), COD (90692 ton/tahun), SS (50876 ton/tahun), TDS (100922 ton/tahun), N (9125 to/tahun) dan P (1106 ton/tahun). Sedangkan adanya koliform secara signifikan dapat menjadikan sungai memiliki jumlah koliform lebih dari 100000 koloni/100ml (baku mutu hanya 10000 koloni/100ml).



Pencemaran limbah domestik

Bahan organik yang terdapat pada limbah cair domestik dapat memberikan dampak terhadap adanya proses oksidasi perairan yang akan menurunkan jumlah oksigen dalam air. Selain itu adanya bahan organik dan nutrien akan memacu pertumbuhan alga dan tanaman air lainnya dengan cepat (eutrofikasi). Zat padatan yang terdapat dalam limbah cair sangat mempengaruhi kondisi perairan secara fisik dan juga secara tidak langsung dapat menimbulkan sedimentasi. Sedangkan mikroorganisme koliform dapat menimbulkan bahaya penyakit bagi manusia.

Pengelolaan terhadap limbah cair domestik telah dilakukan oleh masyarakat dengan membuat jamban yang baik. Namun demikian belum seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Banten membuat jamban yang memenuhi syarat kesehatan. Berdasarkan data yang ada, penggunaan jamban yang telah memenuhi syarat kesehatan oleh masyarakat pada masing-masing kabupaten telah mencapai 28,31-80,23 persen, dengan jumlah terendah terdapat pada Kabupaten Lebak (28,31%) dan tertinggi pada Kota Tangerang (80,23 %). Adanya jamban ini akan mengurangi limbah cair domestik yang harus dibuang ke air permukaan.

Pengelolaan lainnya yang dilakukan masyarakat Provinsi Banten adalah dengan mengolah limbah cair domestik dengan membangun kolam oksidasi (Oxidation Pond), seperti yang dilakukan pada wilayah Karawaci (Tangerang). Kolam oksidasi ini mampu melayani ± 7.000 KK atau sekitar 1.800 sambungan. Kolam pengolahan ini merupakan satu alternatif yang dapat dilakukan untuk mengolah limbah cair dengan menggunakan penambahan oksigen ke dalam limbah, sehingga limbah tersebut dapat terurai dengan cepat. Pengelolaan limbah cair domestik yang tidak terolah pada jamban, selama ini tidak dilakukan dengan tepat. Pada umumnya limbah yang keluar akan masuk ke dalam saluran air limbah dan langsung menuju sungai atau air permukaan lainnya.

5.2.4 LIMBAH CAIR INDUSTRI

Macam industri/aktivitas yang ada di Provinsi Banten sangat beragam, dari industri kecil menengah, rumah sakit, pariwisata, sampai industri besar yang memiliki resiko lingkungan yang tinggi. Industri kecil yang ada di Provinsi Banten didominasi oleh industri pangan, kerajinan logam dan penambangan emas dan pasir. Sedangkan industri besar di wilayah ini umumnya adalah industri kimia, logam dasar dan industri berbasis petroleum. Limbah cair yang keluar dari kegiatan industri harus diperhatikan dan diupayakan pengelolaannya agar pengaruh negatif (pencemaran) dapat diminimalkan. Dampak limbah cair ini tidak hanya merusak



lingkungan, tetapi secara langsung juga dapat membahayakan manusia/makhluk hidup, terutama sekali limbah cair yang memiliki sifat berbahaya dan beracun (B3).

Industri pariwisata banyak terdapat di wilayah Provinsi Banten, terutama sekali di daerah pantai. Limbah cair dari industri pariwisata ini hampir sama dengan limbah cair domestik, yaitu dengan kandungan bahan organik dan koliform yang tinggi. Selain itu kegiatan laundry yang biasanya terdapat pada hotel, menghasilkan limbah cair dengan kandungan senyawa yang bersifat toksik bagi perairan. Pada umumnya pengelolaan limbah cair industri pariwisata, terutama hotel, dilakukan dengan menggunakan jamban, namun untuk kegiatan lainnya belum dilakukan secara benar.

Limbah rumah sakit memiliki sifat infeksius dan juga toksik akan menjadi permasalahan lingkungan, jika tidak diolah dengan baik. Limbah ini akan mengakibatkan tersebarnya bibit-bibit penyakit (vektor penyakit) dan dikhawatirkan dapat menimbulkan wabah pada daerah pembuangannya. Selain itu, sifat toksik dari beberapa jenis limbah rumah sakit akan menimbulkan kematian makhluk hidup disekitarnya. Sebagian besar rumah sakit yang ada di Provinsi Banten telah memiliki sarana pengolahan limbah cair. Namun demikian ada yang belum secara optimal dapat menyisihkan bahan-bahan pencemar secara efektif.

Industri besar yang ada di Provinsi Banten perlu mendapat perhatian lebih tinggi, karena sebagian besar industri-industri ini menggunakan bahan B3 dan menghasilkan limbah B3.



Wasdal B3 Industri

Limbah B3 memerlukan penanganan dan pengelolaan yang khusus. Biasanya limbah tersebut harus dikumpulkan dalam wadah kedap, tahan korosi dan tertutup rapat yang tidak memungkinkan bahan tersebut lepas keluar. Bahan kemudian harus dikirim ke Pusat Pengolahan Limbah Industri (PPLI), yang saat ini baru terdapat satu yaitu di Cileungsi, Bogor. Beberapa limbah B3 misalnya hidrokarbon, fenol dan logam berat

terlarut dapat diturunkan terlebih dahulu konsentrasinya melalui teknologi bioremediasi. Selain industri yang berpotensi menghasilkan limbah B3, industri non B3 juga berpotensi menghasilkan limbah yang dapat mencemari lingkungan, seperti adanya kandungan bahan organik yang tinggi (industri gula dan kelapa sawit).

Pengelolaan limbah cair industri besar, umumnya telah dilakukan oleh industri, dengan membuat sarana pengolahan limbah cair. Namun demikian perlu juga diawasi optimasi pengolahan limbah cair pada masing-masing industri. Beberapa pemantauan menunjukkan masih adanya kandungan bahan pencemar pada outlet pengolahan limbah cair.



Pengambilan Sampel Air Industri

5.3 Sumber Daya Lahan

Peningkatan jumlah penduduk di Propinsi Banten berdampak pada peningkatan kebutuhan ekonomi. Masyarakat pedesaan yang terbatas sumberdaya ekonominya mencari alternatif sumberdaya ekonomi dengan mengeksplorasi sumberdaya alam yang terdekat dan termudah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi tersebut. Komponen lingkungan atau



sumberdaya alam yang paling mudah dieksploitasi oleh masyarakat desa ialah lahan pekarangan miliknya atau yang ada di sekitar mereka. Yang sering dijumpai ialah kegiatan penambangan liar berupa penggalian pasir baik di bukit maupun di sungai. Selain penambangan pasir juga ada penambangan emas dan batubara serta penebangan hutan secara liar yang tidak mengindahkan aspek kelestarian lingkungan hidup.

